

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

**I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika¹
Luh Gede Sri Artini²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail:suryaadi956@yahoo.co.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan untuk periode waktu 2007-2011. penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 16,33% dengan kriteria penilaian kurang, Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola anggaran sangat baik dengan hasil sebesar 101,62% , Tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sangat efektif sebesar 120,29, dan analisis tingkat efisiensi rata-rata sebesar 14,77% dengan penilaian cukup efisien.

Kata kunci : *kemandirian, kemampuan, efektivitas, efisiensi*

ABSTRACT

The aim of this research is to know the rate of autonomous, effectiveness, and efficiency of financial performance from Tabanan regency's government. This research was did for period 2007 until 2011. the type of this research is descriptive research. based from analysis, we found that the rate of autonomous financial performance from Tabanan regency's government during fiscal year 2007 until 2011 is 16,33%, rate of local financial capability is 101,62%, the effectiveness of government revenue is 120,29%, and average efficiency rate is 14,77%.

Keywords : *autonomous, ability, effectiveness, efficiency*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pergantian pemeritahan Orde Baru ke pemerintahan Reformasi terjadi pada pertengahan tahun 1998 yang telah mengalami perubahan ketatanegaraan maupun kebijakan perekonomian. Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini divisi dengan dikeluarkannya UU no.32 tahun 2004 dan UU no 33 tahun 2004. Diberlakukannya undang-undang ini dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keungan daerah.

Halim (2011:253) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat arus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan.

Kabupaten Tabanan adalah satu diantara semua Kabupaten yang ada di Provinsi Bali yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Besarnya

kontribusi PAD terhadap total penerimaan anggaran Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 1 Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tabanan
Tahun Anggaran 2007 – 2011

TAHUN	PAD	DANA BERIMBANG (Dbr)	REALISASI		PAD / TPD %	Dbr / TPD %
			PENDAPATAN (TPD)	PENGELUARAN (TBD)		
2007	47,501,735.69	443,325,740.75	540,824,254.88	518,700,752,091.22	7.158	81.972
2008	87,379,828.75	499,870,538.45	663,606,798.87	649,194,822,252.31	12.665	75.326
2009	93,840,477.89	513,030,256.84	689,934,994.11	701,093,929,126.83	11.956	74.359
2010	116,860,678.34	513,683,612.13	784,878,353.84	780,279,107,485.72	13.185	65.448
2011	141,046,016.98	534,404,760.45	886,307,833.59	882,937,169,687.26	15.914	60.296
RATA - RATA =					12.176	71.480

Sumber : BPS 2007 - 2011

Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Tabanan ditemukan bahwa kontribusi PAD terhadap realisasi penerimaan anggaran Kabupaten Tabanan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2007 sampai 2011. Pada tahun 2007 kontribusi yang diberikan sebesar 7,15 %, ini meningkat pada tahun 2008 sebesar 12,66 %. Kontribusinya mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 11,96 %. Pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 13,18 % dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 15,91 %. Secara keseluruhan realisasi penerimaan kabupaten Tabanan bahwa porsi penerimaan PAD dari tahun ke tahun meningkat dan ketergantungan dana bantuan pusat sampai saat ini masih dominan.

Pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di kabupaten Tabanan peranan bantuan dari pemerintah pusat masih tinggi hal ini bisa dilihat dari tingginya pendapatan dana berimbang dari tahun 2007 sampai tahun 2011 (BPS, 2012). Besarnya prosentase pendapatan dana berimbang terhadap total

[Type text]

realisasi penerimaan Kabupaten Tabanan dari tahun 2007 sampai tahun 2009 sebesar 77,21 %, dan dari tahun 2010 sampai tahun 2011 sebesar 62, 87 %. Kemandirian keuangan daerah bisa diwujudkan dengan peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat efektivitas dan efisiensi di kabupaten Tabanan.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam NKRI sesuai UUD1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Republik Indonesia mempunyai kesatuan pemerintah lain yang bersifat negara. Artinya sebuah kedalautan yang melekat kepada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak dapat terbagi dengan kesatuan pemerintahan. Sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah (Suwandi, 2002).

Undang-undang no. 32 Tahun 2004 dan undang-undang no.33 Tahun 2004 dikenal adanya desentralisasi kewenangan, pelimpahan kewenangan, dan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahan dalam kesatuan Republik Indonesia (Nehen, 2012:408). Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi rakyat dalam Republik Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. berdasarkan pasal 6 UU No.33 tahun 2004 pendapatan asli daerah bersumber dari : redistribusi daerah , pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Undang-undang No.32 tahun 2004 menetapkan perubahan terhadap aliran dana dari pusat ke daerah. Dalam Undang-undang tersebut, komponen perimbangan tidak mengalami perubahan, tetapi terjadi perubahan proporsi aliran dana dari pusat dan daerah. dalam undang-undang

tersebut komponen perimbangan tidak mengalami perubahan , tetapi terjadi proporsi aliran dana.

Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman bersumber dari : Pemerintah; Pemerintah daerah; lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank; dan masyarakat

Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan seperti bencana alam yang tidak diinginkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia

Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- Rasio Kemandirian :

Rasio ini juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal . Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat +Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

[Type text]

Kriteria Pengukurannya :

Tabel 2. : Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00 %	Sangat Kurang
10,01-20,00 %	Kurang
20,01-30,00 %	Sedang
30,01-40,00 %	Cukup
40,01-50,00 %	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

- Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah (Sularso, 2011), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KKDT = \frac{TPD_t}{TBD_t} \times 100\%$$

Keterangan :

KKDt = kemampuan keuangan daerah dalam persen

TPDt = total pendapatan daerah tahun t

TBD_t = total belanja daerah tahun t

Tabel 3. : Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00%	Sangat Kurang
10,01-20,00%	Kurang
20,01-30,00%	Sedang
30,01-40,00%	Cukup
40,01-50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

- Rasio Efektivitas :

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. : Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011:171)

- Rasio Efisiensi :

Rasio efisiensi bertujuan untuk menilai apakah sejauh mana efisiensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan . Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. : Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 5%	Sangat Efisien
5% - 10%	Efisien
11% - 20%	Cukup Efisien
21% - 30%	Kurang Efisien
> 30%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2011:171)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian tentang kemandirian keuangan daerah ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk periode waktu tahun 2007 sampai tahun 2011. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan deskriptif. Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif dengan melakukan pendekatan:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2) Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah dapat mendukung otonomi daerah (Sularso, 2011). Semakin besar rasio kemampuan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efisiensi bertujuan untuk menilai apakah sejauh mana efisiensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan (Halim, 2011:255).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari sumber PAD selama kurun waktu 5 tahun (2007-2011) seperti terlihat pada Tabel 6 menunjukkan gambaran struktur keuangan dari sisi penerimaan PAD Kabupaten Tabanan.

Tabel 6.
Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Tabanan
Tahun Anggaran 2007 – 2011 (dalam ribuan rupiah)

TAHUN	Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)				PAD	Peningkatan %
	Pajak-pajak	Retribusi Daerah	BUMD	Penerimaan Lain-lain		
2007	15,589,381.01	25,528,764.38	3,413,758.02	2,969,832.29	47,501,735.69	7.412
2008	18,264,837.88	42,388,811.22	3,688,172.41	23,038,007.24	87,379,828.75	83.951
2009	20,897,150.43	15,143,387.70	4,236,293.47	53,563,646.29	93,840,477.89	7.394
2010	23,703,375.43	16,536,413.34	4,788,026.16	71,832,863.41	116,860,678.34	24.531
2011	31,009,884.30	20,524,711.59	5,404,979.18	84,106,441.90	141,046,016.98	20.696

Sumber : Bagian Keuangan, Perhitungan APBD Kabupaten Tabanan 2007 – 2011, dan analisis.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan selama kurun waktu 5 tahun (2007-2011), menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Tahun 2007 pertumbuhan sebesar 7,41 persen diikuti dengan pertumbuhan yang hanya 83,95 persen di tahun 2008; tahun 2009 pertumbuhan menjadi 7,39 persen; meningkat lagi pertumbuhan di tahun 2010 menjadi 24,53 persen; dan terakhir data tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 20,69 persen, sehingga rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu 5 tahun sebesar 28,79 persen.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan dalam mendukung penerimaan daerah masih sangat kecil hal ini dapat dilihat pada tabel 7. Perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total

[Type text]

penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2011 menunjukkan rata-rata sebesar 13,27 persen.

Tabel 7. Perbandingan PAD Terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2007 – 2011

TAHUN	PAD	TOTAL PENDAPATAN	PERANAN PAD %
2007	47,501,735.69	540,824,254.88	8.783
2008	87,379,828.75	663,606,798.87	13.167
2009	93,840,477.89	689,934,994.11	13.601
2010	116,860,678.34	784,878,353.84	14.889
2011	141,046,016.98	886,307,833.59	15.914
RATA - RATA			13.271

Sumber : Bagian Keuangan, Perhitungan APBD Kabupaten Tabanan 2007 – 2011, dan analisis

Peranan PAD yang sangat kecil terhadap total penerimaan pendapatan dan berarti otonomi daerah dalam menyusun RAPBD belum didukung oleh kemandirian daerah secara *finansial*. Karena itu usaha untuk meningkatkan kemandirian daerah secara *finansial* masih merupakan tantangan penting yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan pada periode yang akan datang.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan dari transfer pemerintah pusat, propinsi dan pinjaman (TPD) yang merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama kurun waktu 5 tahun (2007-2011) dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini :

Tabel 8. Tingkat Rasio Kemandirian
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2007 -2011

TAHUN	PAD	TRANSFER + PINJAMAN TPD	PAD / TPD %	KRITERIA
2007	47,501,735,694.21	473,620,524,665.76	10.029	Kurang
2008	87,379,828,751.10	532,705,105,446.00	16.403	Kurang
2009	93,840,477,885.31	575,928,535,220.00	16.294	Kurang
2010	116,860,678,336.51	663,197,855,505.00	17.621	Kurang
2011	141,046,016,976.85	661,486,962,772.00	21.323	Sedang
RATA - RATA			16.334	Kurang

Sumber : Bagian Keuangan, Perhitungan APBD Kabupaten Tabanan 2007 – 2011, dan analisis

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada Tabel 8 di atas, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 16,33 % sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah Kabupaten Tabanan dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Kemampuan Keuangan Daerah

Nilai kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari perbandingan total pendapatan dengan total belanja daerah, kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Analisis kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2011 tersaji pada tabel 9.

Tabel 9. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2007 -2011

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN (TPDt)	TOTAL BELANJA (TBDt)	TPDt / TBDt %	KRITERIA
2007	540,824,254,884.97	515,146,186,235.10	104.985	Sangat baik
2008	663,606,798,868.62	645,177,786,946.13	102.856	Sangat baik
2009	689,934,994,105.31	701,015,893,832.71	98.419	Sangat baik
2010	784,878,353,841.51	773,701,072,191.54	101.445	Sangat baik
2011	886,307,833,591.26	882,459,134,393.14	100.436	Sangat baik
RATA - RATA			101.628	Sangat baik

Sumber : Bagian Keuangan, Perhitungan APBD Kabupaten Tabanan 2007 – 2011, dan analisis

Berdasarkan rasio tingkat kemampuan keuangan pada Tabel 9 di atas, rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 101,62 % sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan Keuangan Daerah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.

Efektivitas Dan Efisiensi

Rasio Efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi yang diukur dengan satuan persen. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi pendapatan daerah dengan anggaran/target pendapatan daerah. Hasil perhitungan rasio tingkat efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Tabanan selama kurun waktu 5 tahun (2007-2011) dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Tingkat Rasio Efektivitas
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2007 -2011

TAHUN	REALISASI PAD (PAD r)	TARGET PAD (PAD t)	PAD r / PAD t %	KRITERIA
2007	47,501,735,694.21	45,346,533,000.00	104.753	Sangat efektif
2008	87,379,828,751.10	51,063,584,889.92	171.120	Sangat efektif
2009	93,840,477,885.31	85,438,908,598.64	109.833	Sangat efektif
2010	116,860,678,336.51	107,836,347,718.63	108.369	Sangat efektif
2011	141,046,016,976.85	131,326,046,214.60	107.401	Sangat efektif
RATA - RATA			120.295	Sangat efektif

Sumber : Bagian Keuangan, Perhitungan APBD Kabupaten Tabanan 2007 – 2011, dan analisis

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa capaian/realisasi pendapatan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama kurun waktu 5 tahun selalu berada diatas angka 100 persen atau rata-rata sebesar 120,29 persen. Sesuai dengan kriteria penilaian maka tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan termasuk dalam katagori sangat efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sudah tepat dan realistis dalam merencanakan pendapatannya terlihat dari rata-rata capaiannya yang berkreteria sangat efektif.

Rasio efisiensi bertujuan untuk menilai sejauh mana efisiensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan. Analisis tingkat efisiensi selama 5 tahun dari tahun anggaran 2007 sampai 2011 pada pemerintah Kabupaten Tabanan tersaji pada tabel 11.

Tabel 11. Tingkat Rasio Efisiensi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2007 -2011

TAHUN	BIAYA PEMEROLEHAN (PAD p)	REALISASI PAD (PAD r)	PAD p / PAD t %	KRITERIA
2007	11,217,033,208.89	47,501,735,694.21	23.614	Kurang efisien
2008	12,972,529,169.70	87,379,828,751.10	14.846	Cukup efisien
2009	13,195,698,190.00	93,840,477,885.31	14.062	Cukup efisien
2010	16,457,067,868.00	116,860,678,336.51	14.083	Cukup efisien
2011	10,238,385,604.00	141,046,016,976.85	7.259	Efisien
RATA - RATA			14.773	Cukup efisien

Sumber : Bagian Keuangan, Perhitungan APBD Kabupaten Tabanan 2007 – 2011, dan analisis

Selama periode tahun anggaran 2007 sampai tahun 2011, tingkat efisiensi mengalami peningkatan dan hal ini ditunjukkan dengan tingkat rasio pada tahun 2007 dengan kriteria kurang efisien, dari tahun 2008 – 2010 dengan klasifikasi cukup efisiensi dan tahun 2011 tingkat rasio efisiensi dengan klasifikasi efisiensi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap “ Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan selama 5 tahun dari tahun 2007 – 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2011 menunjukkan rata-rata sebesar 13,27 persen. Peranan PAD yang sangat kecil terhadap total penerimaan pendapatan dan berarti didalam penyusun RAPBD di era otonomi belum didukung oleh kemandirian daerah secara *finansial*.

Pada kurun waktu 5 tahun telah terjadi peningkatan pertumbuhan PAD sebesar 107.314 % dan hasil ini menunjukkan daerah memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD.

- 2) Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 16,33 % sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian adalah kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
- 3) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 101,62 % sehingga penilaian diklasifikasikan sangat baik dan berarti memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola anggaran untuk menjalankan roda pemeritahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.
- 4) Realisasi pendapatan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama kurun waktu 5 tahun selalu berada diatas angka 100 persen atau rata-rata sebesar 120,29 persen. Sesuai dengan kreteria penilaian maka tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan termasuk dalam katagori sangat efektif. Sedangkan analisis tingkat efisiensi rata-rata sebesar 14,77 dengan kriteria cukup efisien. Efisiensi pemerintah dalam merealisasikan pendapatan perlu ditingkatkan dalam upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai saran yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah Kabupaten Tabanan maka diperlukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan memiliki kemampuan yang cukup dalam menggali sumber-sumber PAD potensial melalui penerimaan yang bersumber dari peningkatan pajak, retribusi, pengelolaan BUMD dan rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten Tabanan.
- 2) Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam peningkatan redistribusi daerah adalah pengembangan kawasan strategis yang memperhatikan keseimbangan daya dukung alam antara potensi sumber daya alam dengan rencana pengembangan wilayah.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Bali Dalam Angka*. Propinsi Bali.
 2007 – 2012. *Tabanan Dalam Angka*. Propinsi Bali.
- Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga.
- Enlison Mattos. 2007. Inequality and size of government : evidence from brazillian state, University of Sao Paulo and CEPESP, Sao Paulo, Brazil, *Jurnal financial* 35(4):h:333-351.
- Halim, Abdul. 2012. *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Edisi 4.Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN.

- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah : Bagaimana membangun ekonomi lokal, kota dan kawasan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mangkoesebroto. 2010. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- 2009. Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana Pinjaman Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999. *Dalam Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Penyunting : Abdul Halim. Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
- 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Mardalis. 1990. *Metode Penelitian*. Pt. Melton Putra Jakarta.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nehen. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Udayana University Press.
- Sudewi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan PRopinsi Bali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Sularso, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.